

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Poverty Alleviation Strategy

Pairan

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
Jalan Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember Jawa Timur. E-mail: <pakpe99@yahoo.com>, HP 08123491681.
Diterima 12 Agustus 2015, direvisi 20 Agustus 2015, disetujui 30 Agustus 2015.

Abstract

The objective of this research is to analyze the strategy of poverty alleviation in the field of economics, socials, and environments made by Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (cities self-supporting empowerment national programs). This research is a case study with the design of single case which has more than one unit analysis. By applying this method, it is hoped that the findings are able to describe how the strategies of poverty alleviation use the empowerment approach. The findings show that the strategy of poverty alleviation has been done by digging the society volunteer competencies who have to be the society cadres of poverty alleviation. These cadres and the facilitators who are the officials of PNPM have facilitated to found the local organization with the name of Lembaga Keswadayaan Masyarakat/LKM (self-supporting society institutions). This institution is an embryo of social capital which has a bridge functions for making a synergies relationship from the poor to the sources that are able to use for poverty alleviation in the society and others. The process of poverty alleviation facilitation is by using trust, cooperative, and networking through the cycles of poverty alleviation. These cycles are; reflecting poverty, mapping self-supporting, founding the local organization, arranging the programs of poverty alleviation, forming KSM, and driving the activities on the priorities of economics, socials, and environment.

Keywords: *Strategy; Poverty Alleviation; Social Capital*

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis strategi dalam penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang lingkungan dalam Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Mandiri Perkotaan. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan desain penelitian untuk mempelajari kasus tunggal yang memiliki lebih dari satu unit analisis, sehingga bisa mengungkap bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggali potensi relawan masyarakat yang akan menjadi kader masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Kader masyarakat inilah bersama fasilitator kelurahan memfasilitasi pembentukan organisasi lokal yang diberi nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai persemaian modal sosial masyarakat yang berfungsi menjembatani, menghubungkan dan mensinergikan warga miskin dengan sumber daya dari dalam masyarakat dan luar masyarakat yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Proses fasilitasi penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan modal sosial altruisme, kepercayaan, kerjasama dan jaringan sosial dimanfaatkan melalui siklus penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan organisasi lokal, penyusunan PJM penanggulangan kemiskinan, pembentukan KSM dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: *Strategi Penanggulangan; Kemiskinan; Modal Sosial.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan pengalaman sejarah di Indonesia, kemiskinan yang dialami masih merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, sehingga seolah-olah merupakan isu abadi sepanjang jaman. Padahal di sisi kehidupan yang

lain sudah memasuki era modern ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya modern. Kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami oleh semua bangsa di dunia. Sejak Indonesia merdeka pembangunan selalu terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan, baik

pembangunan pada masa orde lama, orde baru maupun masa kini.

Menurut Sulistiyani (2004: 4) kemiskinan secara eksplisit adalah sebagai fenomena, hanya akan dilihat bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan sampai sejauh mana upaya tersebut mampu meraih apa yang diinginkan. Nuansa penanggulangan kemiskinan selama ini masih sangat diwarnai oleh pemikiran seperti ini. Oleh karena itu, banyak program pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, bukan mencari jalan keluar untuk meringankan beban kemiskinan dengan melalui usaha meningkatkan kemampuan secara bertahap. Dengan demikian aras pemikiran ini terlalu dangkal dan tidak menyentuh masalah yang lebih mengakar dan hakiki.

Menurut catatan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1960 melalui program yang diberi nama Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tangan jalan akibat krisis politik tahun 1965. Sejak tahun 1948 minimal ada 26 jenis program penanggulangan kemiskinan. Rincian programnya: Pertama, periode tahun 1945-1968, jenis programnya: Plan Kasimo (Rencana Produksi Tiga Tahun) tahun 1948; Rencana Kesejahteraan Indonesia (RKI) Tahap I dan II tahun 1950-1959; Padi Sentra tahun 1958; Komando Gerakan Makmur (KOGEM) tahun 1959; Bimbingan Masal tahun 1965; Intensifikasi Masyarakat tahun 1968. Kedua: periode tahun 1969-1989 (Repelita I-IV), jenis programnya: Bimas Gotong Royong tahun 1969; Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) tahun 1974-1990; Intensifikasi Khusus (INSUS) tahun 1979; Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) tahun 1979-2000; Kredit Usaha Tani (KUT) 1985-2000; Supra Insus tahun 1987; Kredit Candak Kulak (KCK) tahun 1987. Ketiga: Periode 1990-1997, jenis programnya: Pengembangan Prasarana Pendukung Desa Ter-

tinggal (P3DT) tahun 1993; Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSP-KUD) tahun 1994; Inpres desa Tertinggal (IDT) tahun 1994-1996; Proyek Kredit Mikro (PMK) tahun 1995-2001; Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) tahun 1995; Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra Kukesra) tahun 1996. Keempat: Periode 1998-2005 (pasca krisis ekonomi) jenis programnya: Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 1998-2003; Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 1998–sekarang; Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tahun 1999-sekarang; Program Kredit Ketahanan Pangan (KPP) tahun 2000; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2000; Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tahun 2001; Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (BBM) 2001. (Hafsah, 2008: 75-78).

Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut apabila dikaitkan dengan data statistik ternyata mempengaruhi penurunan angka kemiskinan absolut. Menurut data statistik tahun 1976 angka kemiskinan cukup besar mencapai 40.1persen kemudian bersamaan digulirkan berbagai program penanggulangan tersebut secara terus menerus mengalami penurunan hingga tahun 1996 penduduk miskin tinggal 11.3 persen. Namun demikian ketika di Indonesia terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 angka penduduk miskin melonjak hingga mencapai 39.1persen pada tahun 1998. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hanya satu tahun krisis terjadi kenaikan angka kemiskinan drastis mencapai tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan absolut pada tahun 1996 yang hanya 11,3 persen, atau hampir mendekati angka kemiskinan dua puluh tahun sebelumnya yakni pada tahun 1976 yang angka kemiskinannya mencapai 40.1 persen.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa program kemiskinan di Indonesia belum efektif dan penduduk miskin masih sangat rentan terhadap faktor-faktor guncangan dari luar yang menyebabkan mereka menjadi miskin kembali. Kerentanan penduduk miskin dipengaruhi

beberapa faktor, menurut Sulistiyani (2004: 20) bahwa dalam konteks kemiskinan absolut letak permasalahannya adalah pada kondisi masyarakat yang tidak berdaya untuk memenuhi lima kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar). Berbeda dengan konteks kemiskinan struktural letak permasalahannya adalah pada ketidakjangkauan akses terhadap sumber ekonomi, perumahan, pendidikan dan kesehatan, karena kemampuan yang dimiliki terbatas.

Menurut Narayan, dkk (2000: 26-28) bahwa yang menyulitkan atau membuat kemiskinan itu sulit ditangani adalah sifatnya yang tidak saja multidimensional tetapi juga saling mengunci; dinamis, kompleks, sarat dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender dan peristiwa yang khas per lokasi. Pola kemiskinan sangat berbeda antar kelompok sosial, umur, budaya, lokasi dan negara juga dalam konteks ekonomi yang berbeda. Lebih lanjut, menurut Sutomo (2010: 285) bahwa Faktor kelemahan fisik dapat disebabkan karena kondisi kesehatan dan faktor gizi buruk, sehingga dapat mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah. Faktor isolasi terkait dengan lingkup jaringan interaksi sosial yang terbatas, serta akses terhadap informasi, peluang ekonomi dan fasilitas pelayanan yang terbatas pula. Faktor kerentanan terkait dengan tingkat kemampuan yang rendah dalam menghadapi kebutuhan dan persoalan mendadak. Faktor ketidakberdayaan terkait dengan akses dalam mengambil keputusan, akses terhadap penguasaan sumberdaya dan posisi tawar.

Berdasarkan akar penyebab kemiskinan tersebut, penanggulangan kemiskinan dapat diartikan sebagai upaya untuk memotong mata rantai yang menyebabkan ketidakberdayaan penduduk miskin. Dengan demikian strategi penanggulangan ditujukan untuk memotong mata rantai penyebab kemiskinan tersebut yakni faktor isolasi terkait dengan lingkup jaringan interaksi sosial yang terbatas, akses terhadap informasi yang terbatas, serta peluang ekonomi dan fasilitas pelayanan yang terbatas pada penduduk miskin melalui proses pemberdayaan, sehingga

penduduk miskin mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Agar dalam pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuannya maka langkah-langkah yang perlu dilakukan menurut Nugroho (1995: 35-35) pertama, meningkatkan kesadaran kritis masyarakat atas posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin tersebut tinggal; kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan; ketiga, penanaman rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial; keempat, merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.

Sedangkan konsep pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial bisa dirujuk dari pendapat Rubin dan Rubin (2001: 77) yang menyatakan bahwa pemberdayaan dikonsepsikan dari perspektif pengorganisasian, sehingga pemberdayaan adalah tujuan inti dari pengorganisasian. Hal ini dimaksudkan bahwa pemberdayaan dilakukan secara kolektif melalui organisasi, dengan melalui organisasi orang-orang bisa diberdayakan untuk menyadari atau untuk memahami sejauh mana mereka bisa mengakses sumber daya sosial yang ada melalui kekuatan hubungan antara anggota individu dalam organisasi itu, dan juga melalui partisipasi aktif dalam organisasi dan berikutnya mereka bisa merefleksikan keterlibatan tersebut. Dalam Konsep kekuatan atau kemampuan berasal dari solidaritas sosial yang muncul sebagai anggota dalam kelompok, di mana dengan melalui kekuatan atau kemampuan yang dimiliki kelompok tersebut upaya individu untuk mengatasi segala permasalahan dan memberdayakan dirinya bisa disalurkan secara terfokus dan efektif melalui organisasi atau kelompok yang diikuti. Pemberdayaan dalam persepektif pekerjaan sosial lebih diorientasikan pada bagaimana proses pemberdayaan itu dilakukan dan bagaimana proses intervensi pemberdayaan tersebut, artinya dalam persepektif pekerjaan sosial pemberdayaan adalah merupa-

kan metode yang digunakan dalam intervensi komunitas.

Menurut Robbins dkk. (2012: 94), strategi khusus yang perlu dikembangkan oleh pekerja sosial dalam mengintervensi masyarakat melalui pemberdayaan adalah bahwa sebelum orang dapat mulai mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan serta kontrol atas hidup mereka, mereka harus terlebih dahulu mengidentifikasi kekuatan-keuatan yang langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakberdayaan mereka. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud meliputi: perbuatan, kejadian atau kondisi yang mengganggu proses dimana individu mengembangkan keterampilan pribadi dan dan keterampilan sosial yang efektif.

Bersamaan berkembangnya konsep dan strategi pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut sekitar tahun 1990 Bank dunia merumuskan kebijakan baru tentang pembangunan yang berkelanjutan. Gagasan-gagasan ini selanjutnya diimplementasikan di dalam program pengurangan kemiskinan Bank Dunia, yang menekankan pembangunan yang didorong oleh komunitas, partisipasi kelompok komunitas dalam pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas organisasi lokal, dan seleksi proyek yang sesuai dengan keinginan lokal.

Pergeseran kebijakan Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan tersebut dibarengi berkembangnya paradigma pembangunan yang lebih humanis yang menekankan pada kelestarian lingkungan dan pembangunan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi pembangunan berkelanjutan, maka program-program penanggulangan kemiskinan termasuk didalamnya program-program yang didanai oleh Bank Dunia diberbagai negara diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan menempatkan manusia dan modal sosial sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Dalam proses inilah unsur modal sosial sudah diupayakan untuk dimanfaatkan dalam proses

penanggulangan kemiskinan berbarengan dengan modal komunitas yang lain.

Pergeseran kebijakan Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan tersebut dibarengi berkembangnya paradigma pembangunan yang lebih humanis yang menekankan pada kelestarian lingkungan dan pembangunan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi pembangunan berkelanjutan, maka program-program penanggulangan kemiskinan termasuk didalamnya program-program yang didanai oleh Bank Dunia diberbagai negara diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan menempatkan manusia dan modal sosial sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Dalam proses inilah unsur modal sosial sudah diupayakan untuk dimanfaatkan dalam proses penanggulangan kemiskinan berbarengan dengan modal komunitas yang lain.

Dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan *World Bank* memberi perhatian yang tinggi dengan mengkaji peranan dan implementasi modal sosial khususnya untuk pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Paham yang dikembangkan oleh *World Bank* dengan menggunakan modal sosial didasari pada asumsi: Modal sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik, serta hubungan sosial (*social relationships*) mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja, dan sebaliknya pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana modal sosial di masyarakat bersangkutan; Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual; Modal sosial dalam satu masyarakat dapat diperkuat, namun membutuhkan dukungan sumber daya tertentu untuk memperkuatnya; dan Agar tercipta hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya (Narayan dan Pritchett, 1997: 184-190).

Selang lima tahun berikutnya yakni tahun 1995 pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan semakin mendapat jus-

tifikasinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial yang dilaksanakan di Kopenhagen 12 maret 1995. Dalam Konferensi tersebut Modal sosial menjadi kata kunci menanggapi tiga agenda pokok konferensi : mengurangi kemiskinan, penciptaan angkatan kerja yang produktif dan meningkatkan integrasi sosial (Raharjo, 2001: 176). Kemudian di Indonesia mulai tahun 1998 seiring dengan perkembangan pendekatan penanggulangan kemiskinan dan konsep pemanfaatan modal sosial tersebut di atas, dua tahun pasca terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, yakni pada tahun 1999 pemerintah Indonesia melaksanakan program penanggulangan kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dananya diperoleh dari pinjaman Bank Dunia. Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan dengan komponen kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi, pemberdayaan bidang sosial dan pemberdayaan bidang lingkungan. Dalam Program ini secara implisit sudah memanfaatkan modal sosial yang diterapkan sebagai dasar prinsip program yakni prinsip nilai-nilai universal kemanusiaan yang terdiri dari komponen kejujuran, keadilan, dapat dipercaya, ikhlas dan kerelawanan, kepedulian, kesetaraan dan prinsip nilai-nilai universal masyarakat yang terdiri dari komponen demokrasi, partisipasi, transparansi, keberpihakan, akuntabilitas, desentralisasi, dan gotong royong. Pemanfaatan modal sosial tersebut semangatnya adalah disamping dipengaruhi oleh arah kebijakan Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan, juga sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Program ini berlanjut sampai sekarang dan sejak tahun 2007 program tersebut oleh pemerintah Indonesia diubah namanya menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, yang secara tegas memanfaatkan modal sosial yang dituangkan dalam salah satu tujuannya yaitu mengikutkan modal sosial bersama dengan modal komunitas yang lainnya dalam menunjang efektifitas Program penanggulangan kemiskinan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012: 7). Berdasar-

kan latar belakang dan uraian pemikiran tersebut maka masalah dalam kajian ini adalah bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan? Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan tahapan proses penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan tersebut kajian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus eksploratori dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari serangkaian tahapan proses dalam penanggulangan kemiskinan di komunitas kelurahan Kepatihan Kabupaten Jember.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka fokus penelitian ini adalah tahapan proses penanggulangan kemiskinan sebagai penerapan strategi penanggulangan kemiskinan dan proses pembangunan organisasi lokal yang berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi masyarakat dan warga miskin dalam menciptakan dan melaksanakan kegiatan bersama dalam pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan lingkungan.

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni data primer hasil penelitian dilapangan dan data skunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tidak terstruktur, diskusi kelompok terfokus, dan observasi non partisipan. Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisa data dari Miles dan Huberman (1992) melalui tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

C. Strategi Penanggulan Kemiskinan di Kelurahan Kepatihan Jember

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kepatihan yang lokasinya berada di Pusat Ibu Kota Kabupaten Jember, yang merupakan bagian dari tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Kaliwates

Kabupaten Jember yang terdiri dari kelurahan Mangli, kelurahan Sempusari, kelurahan Kaliwates, kelurahan Jember Kidul, kelurahan Tegal Besar dan kelurahan Kebon Agung. Luas wilayah Kelurahan Kepatihan 565 Ha. Kantor Kelurahan terletak di Jl KH Wachid Hasyim Gang XVII No1 Telp.0331-485275. Kode Pos 68137 Kaliwates- Jember.

Berdasarkan wilayah administrasi kelurahan Kepatihan terbagi atas 6 Lingkungan. Wilayahnya mempunyai 26 Rukun Warga (RW) dan 84 Rukun Tetangga (RT). Penduduk kelurahan Kepatihan hingga tahun 2013 sejumlah 14269 jiwa dan 4883 KK. Ditinjau dari mata pencaharian penduduk diketahui bahwa 50 persen penduduk mata pencaharian utama adalah wiraswasta, 15 persen penduduk bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, pekerja serabutan sebanyak 15 persen dari jumlah penduduk. Ditinjau dari tingkat pendidikan Kelurahan Kepatihan sejumlah 5 persen penduduk adalah lulusan SD, 12 persen lulusan SMP. Jenjang pendidikan yang paling sedikit di tempuh oleh penduduk kelurahan kepatihan adalah tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) yaitu sebesar 10 persen. Di kelurahan Kepatihan, ditemukan sebanyak 5 persen penduduk masih buta huruf.

2. Potensi Modal Sosial: Terkait dengan keberadaan organisasi sosial sebagai unsur modal sosial, di kelurahan Kepatihan minal ada 5 organisasi sosial yaitu dasa Wisma (Dama), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Rukun Kematian dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Dasa wisma merupakan mikro organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Rukun Tetangga (RT), organisasi ini merupakan perkumpulan ibu-ibu tetangga dekat yang minimal beranggotaan sepuluh rumah, sesuai dengan namanya dasawisma yang artinya adalah sepuluh rumah, tetapi pada realitanya Dama kadang kala beranggotakan lebih dari sepuluh rumah. Setiap RT minimal terdapat 2 dama. Dalam kegiatan Dasa Wisma ini tertanam unsur modal sosial saling percaya dan unsur kerja

sama diantara anggota, serta mampu membangun jaringan dengan kelompok di luarnya dengan kelompok antar Dasa Wisma melalui kegiatan di RT dan RW sehingga kegiatan ini terlembaga dan sudah mengakar dimasyarakat sejak lama.

Secara struktural, PKK di tingkat RT ditopang dari keberadaan Dasa Wisma, karena anggota PKK RT merupakan para pengurus di Dasa Wisma. Kegiatan di PKK RT hampir sama dengan kegiatan di Dasa Wisma, bedanya kalau di PKK RT anggotanya adalah pengurus Dasa Wisma, sedang di Dasa Wisma anggotanya adalah semua anggota masyarakat ibu-ibu. Unsur modal sosial kepercayaan, kerja sama dan jaringan sosial juga terbangun di kegiatan PKK ini. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan bimbingan petugas puskesmas.

Lembaga berikutnya adalah Rukun kematian merupakan suatu wadah kegiatan sosial yang di miliki warga kelurahan kepatihan yang merupakan gerakan sosial non-politik yang memberikan perlindungan pada anggotanya, dimana pelayanan yang di berikan kepada para anggota merupakan pelayanan jasa kematian seperti, perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah), sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman. Dalam melakukan pelayanan pada para anggotanya pengurus RKM (rukun kematian) secara bersama sama dengan warga lainnya bahu membahu melakukan pelayanan kepada mereka yang mendapat musibah.

Sedangkan lembaga lokal yang dibangun melalui program PNPM adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Pembentukan lembaga ini sebagai upaya pengorganisasian masyarakat untuk mengenali masalah dan melakukan upaya pemecahan masalah kemiskinan di kelurahan, intervensi yang dilakukan PNPM

Mandiri Perkotaan adalah dengan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat yang nantinya akan berfungsi sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang dibangun oleh masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu kemiskinan secara terorganisasi melalui tahapan proses kegiatan penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

3. Tahapan Proses Penanggulangan Kemiskinan: Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tahapan proses kegiatan di masyarakat. Tahapan yang dilakukan dimasyarakat terdiri dari : Rembug Kesiapan masyarakat, Refeksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Penanggulangan Kemiskinan dan Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kegiatan bersama dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Rembug Kesiapan Masyarakat: Rembug kesiapan masyarakat adalah serangkaian kegiatan rembug atau rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan dengan mengundang semua warga dewasa. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai proses belajar masyarakat memutuskan untuk menerima atau menolak intervensi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh pihak pemerintah dan fasilitator. Kegiatan ini sangat penting agar keputusan tentang kegiatan masyarakat tidak hanya ditetapkan oleh perangkat kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat saja, namun melibatkan representasi sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hasil dari kegiatan ini adalah terdaftarnya para relawan masyarakat yang bersedia menjadi kader komunitas dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Keberadaan kader-kader masyarakat merupakan faktor utama bagi jaminan atau prakondisi yang memperlancar proses pembangunan masyarakat oleh masyarakat sendiri (*Development from within*).

Oleh karena itu, secara tegas dapat dikatakan bahwa Kader Masyarakat adalah “agen pembangunan lokal” dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat.

Tahapan Proses Refleksi Kemiskinan: Refleksi kemiskinan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat dalam bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi (masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan pola perilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat. Kesadaran kritis ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, serta menyepakati bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin dan termiskin bersama komponen masyarakat lainnya dalam memanfaatkan akses peluang yang ada di program penanggulangan kemiskinan yang akan mereka lakukan. Refleksi kemiskinan ini dilakukan dengan metode FGD (diskusi kelompok terarah). Hasil dari tahap siklus ini adalah kesadaran masyarakat bahwa persoalan kemiskinan sebenarnya juga persoalan kepedulian semua pihak. Apabila semua warga kepeduliannya sangat rendah terhadap persoalan-persoalan kemiskinan di lingkungannya maka usaha penanggulangan kemiskinan akan semakin berat untuk ditanggulangi. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan adalah upaya membangkitkan kepedulian warga untuk menciptakan kegiatan bersama adalah suatu konsep yang semakin bisa dibuktikan.

Tahap Pemetaan Swadaya: Tahap “Pemetaan Swadaya” adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapinya dan potensi yang dimilikinya sehingga tumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan, dengan berbasis kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Intinya, masyarakat didorong untuk mampu mengiden-

tifikasi “kebutuhan nyata”, dan bukan hanya sekedar “daftar keinginan” mereka.

Tahapan Proses Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM): Agar LKM bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang secara mandiri didirikan oleh warga masyarakat, LKM sebagai institusi masyarakat hanya dapat dibangun dan dibubarkan atas persetujuan, kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan masyarakat yang ada dan tinggal di Kelurahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar LKM benar-benar dimiliki oleh masyarakat, dan tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok unsur perwakilan masyarakat atau pihak-pihak di luar masyarakat.

Dalam pembentukan LKM pemilihnya adalah semua orang dewasa dan diupayakan adanya keseimbangan antara pria dan wanita diundang oleh Fasilitator bersama kader masyarakat bekerja sama dengan RT-RW setempat, melalui suatu rembuk di tingkat Kelurahan untuk memilih minimum 5 nama (sesuai kesepakatan warga) orang-orang di Kelurahan tersebut yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi panitia pembentukan LKM. Hasilnya adalah terpilihnya Panitia Pembentukan LKM. Sebelum prosesi pemilihan dilakukan masyarakat melakukan pembahasan kriteria anggota LKM, dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) tentang Kepemimpinan Masyarakat agar mampu merumuskan kualitas seorang pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengemban amanat masyarakat.

Proses pemilihan adalah setiap pemilih (orang dewasa atau suami dan istri atau wakil KK) memilih 5 sampai dengan 7 nama berbeda (sesuai kesepakatan) orang-orang yang tinggal di RT yang bersangkutan yang memenuhi kriteria tersebut di atas, dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu; dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan warga RT setempat; semua warga yang dipilih di tingkat RT ini kemudian menjadi utusan warga RT untuk dipilih ditingkat RW atau Dusun.

Tahap Perumusan Program Jangka Menengah (PJM) Program penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis): Program Jangka Menengah (PJM) Penanggulangan Kemiskinan berguna untuk menjadi dasar penanggulangan kemiskinan, dengan perencanaan yang baik penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak dilakukan sepotong-sepotong karena persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Hasil rumusan masalah yang sudah didapat dalam PS kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan PJM Pronangkis. Dari daftar rumusan masalah disusun prioritas berdasarkan kriteria yang disepakati bersama oleh masyarakat.

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat: Strategi penanggulangan kemiskinan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dilaksanakan melalui menghimpun potensi relawan masyarakat yang siap menjadi kader masyarakat yang bersedia membantu masyarakat dalam proses penanggulangan kemiskinan melalui tahapan siklus program di masyarakat. Kegiatan ini dimulai sejak tahap Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM) di mulai di kelurahan sasaran program.

Relawan adalah orang-orang atau warga masyarakat setempat yang bersedia mengabdikan secara ikhlas dan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberikan imbalan, rendah hati, berkorban, mendaftarkan diri atau diusulkan oleh masyarakat berdasarkan kualitas sifat kemanusiaan atau moralitasnya, dan memiliki kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upaya kemajuan masyarakat dan kondisi lingkungan wilayahnya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, relawan-relawan akan menjadi tulang punggung dalam semua tahapan proses penanggulangan kemiskinan di Kelurahan. Melalui peran dan fungsi relawan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penanggulangan kemiskinan. Dalam konsep modal sosial nilai kerelawanan adalah wujud dari kesediaan saling

menolong (altruisme). Namun demikian kesediaan saling menolong ini sifatnya masih potensial dan nilai yang paling mendasar adalah orang membantu orang lain yang dalam prosesnya justru membantu mereka sendiri sehingga perlu diorganisir agar menjadi kekuatan dan sumberdaya dalam penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan pengorganisasian dilakukan melalui tahapan program dimasyarakat yakni tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Di dalam tahap persiapan terdiri dari kegiatan sosialisasi awal dan pemetaan sosial; rebug kesiapan masyarakat. Pemetaan sosial yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dinamika sosial dan potensi modal sosial yang ada di masyarakat, serta untuk menyebarkan informasi tentang akan adanya program penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut. Manfaat dari tahap siklus persiapan ini terkait dengan strategi pemanfaatan modal sosial adalah menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat yang bersedia menjadi relawan sebagai kader masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahannya.

Melalui tahapan siklus pertama ini berusaha digali potensi modal sosial yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kemauan masyarakat untuk bekerja sama yakni modal sosial kepercayaan, kerjasama dan jaringan sosial. Modal sosial kepercayaan merupakan aspek utama yang menjadi dasar terjadinya orang mau bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan ini pemanfaatan modal sosial dilakukan melalui membangun kepercayaan diantara warga masyarakat sehingga muncul kesediaan bagi warga untuk berkumpul berdiskusi tentang kemiskinan yang ada disekitarnya dan menjadi kesadaran warga bahwa masalah kemiskinan tersebut harus ditanggulangi secara bersama-sama. Setelah muncul kesadaran warga maka langkah selanjutnya adalah berdiskusi untuk menemukan akar permasalahan kemiskinan dilingkungannya. Sehingga mampu membangkitkan niat bersama untuk menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi.

Dalam mengorganisir masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan selain memanfaatkan modal sosial kepercayaan juga diperlukan modal sosial resiprokal. Dalam modal sosial resiprokal senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan (timbang balik) antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Saling tukar kebaikan ini akan terjadi apabila didasari nilai keiklasan dan nilai altruisme yakni semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Apabila pengorganisasian atau mengorganisir kegiatan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada semangat kerelawanan, keikhlasan dan semangat untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan orang lain akan melahirkan energi sosial sehingga masyarakat lebih mudah membangun diri baik bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pengorganisasian masyarakat ini merupakan strategi intervensi komunitas sebagai upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat tentang masalah kemiskinan yang dihadapi, potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat. Oleh sebab itu, proses pengorganisasian masyarakat sebenarnya sudah dimulai pada saat Refleksi Kemiskinan dimana warga berkumpul mengenali dan merumuskan ciri kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang perlu digali adalah mengapa terjadi kemiskinan di kelurahan mereka dan kemiskinan bukan hanya persoalan kaum miskin sehingga terbangun pemahaman bahwa kemiskinan adalah urusan bersama dan musuh bersama. Situasi ini membangun semangat untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, pengorganisasian masyarakat ini tidak diartikan sebagai membentuk wadah organisasi tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai sesama warga masyarakat di suatu kelurahan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan sebagai sebuah gerakan moral. Untuk memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan inilah diperlukan pimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak yang tidak parsial, tidak mewakili golongan atau kelompok tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu

jadi bersifat impartial. Pimpinan ini juga harus dijaga untuk tidak jatuh dalam nafsu berkuasa yang bersifat otoriter tetapi tetap menjamin proses demokrasi dalam proses pengambilan keputusan disemua tingkatan.

Setelah organisasi masyarakat terbentuk, pimpinan kolektif lembaga masyarakat bersama kader masyarakat dan di bantu fasilitator kelurahan yang disediakan oleh proyek pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk menyusun kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk Program Jangka Menengah (PJM) penanggulangan kemiskinan. Penyusunan PJM Penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan tahap perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang penyusunannya didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat miskin yang akan ditanggulangi, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan musyawarah atau rembuk-rembug warga. Kebutuhan riil masyarakat tersebut didasarkan pada hasil Pemetaan Swadaya yang telah dilakukan pada tahapan siklus sebelumnya. Pada tahap ini ada dua langkah utama, yakni perumusan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh masyarakat, serta penyebarluasan kepihak-pihak terkait (*Stakeholders*).

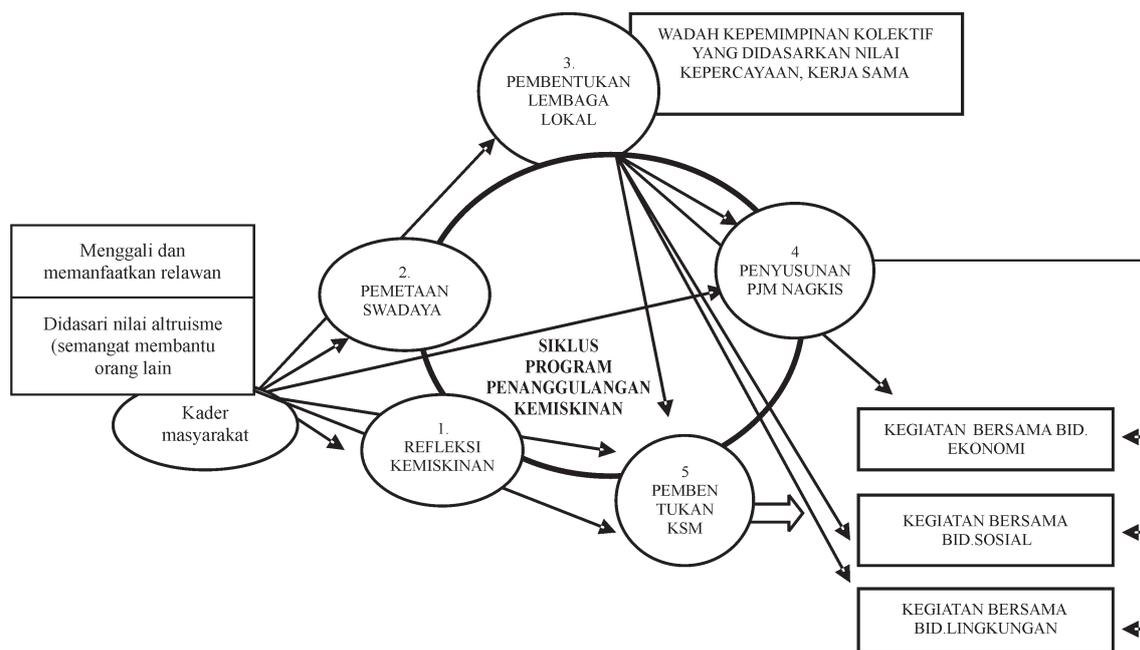
Setelah PJM terbentuk, tahapan siklus berikutnya adalah pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Strategi pemanfaatan modal sosial dalam pembentukan KSM ini adalah didasarkan pada ikatan solidaritas diantara anggota KSM, sebagai wadah belajar, pengembangan kemampuan dan usaha, saling kepercayaan, pengembangan diri dan kelompok masyarakat, sebagai langkah ikut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan warga miskin itu sendiri. Warga miskin yang tergabung dalam KSM dapat menjadi pelaku langsung kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengorganisasian masyarakat yang menyangkut kehidupan mereka sekaligus sebagai alat pembelajaran masyarakat untuk membangun kepedulian dan kesatuan sosial, bukan sarana pengkotak-kotakan masyarakat

dan bukan sarana untuk sekedar memperoleh pinjaman dan bantuan.

Setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk tahapan siklus berikutnya adalah melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang disebut Tri daya yakni pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan. Dengan mendasarkan konsep strategi pemberdayaan Rubin dan Rubin (2001), hasil penelitian ini menemukan model strategi penanggulangan kemiskinan melalui tahapan proses pemberdayaan di masyarakat. Interpretasi teoritik tersebut dapat dikonstruksi Model Strategi penanggulangan kemiskinan seperti tercantum dalam gambar 1.

Pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan pada kondisi orang miskin yang mempunyai keterbatasan untuk membangun jaringan, untuk itu diperlukan organisasi lokal yang berfungsi Menjembatani membangun jaringan agar warga miskin mampu untuk mengakses berbagai sumber daya dan peluang, sebagai sarana meningkatkan kemampuan dan percaya diri, untuk mendapatkan dukungan sosial dalam pengembangan diri. Organisasi lokal juga berfungsi untuk menghubungkan warga miskin dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu, serta untuk memfasilitasi agar warga miskin mampu melakukan sinergi untuk saling bekerjasama antar lembaga lokal, pelaku ekonomi dan lembaga negara.

Namun demikian untuk mewujudkan organisasi lokal yang bisa menjalankan fungsinya tersebut diperlukan keberadaan organisasi lokal yang mengakar di masyarakat yang dipimpin secara kolektif dengan di dasarkan nilai kejujuran, dapat dipercaya dan nilai altruisme (kesediaan menolong orang lain). Tahapan proses sebelum pembentukan organisasi lokal kegiatan yang dilakukan adalah perekrutan relawan masyarakat yang bersedia menjadi kader masyarakat bersama fasilitator kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah memfasilitasi tahapan proses kegiatan di masyarakat sebelum pembentukan organisasi lokal. Relawan adalah orang-orang yang senang



Gambar 1. Model Strategi Penanggulangan Kemiskinan
 Sumber: Hasil penelitian 2014.

membantu orang lain direkrut kemudian dilatih teknik memfasilitasi masyarakat dan substansi program penanggulangan kemiskinan kemudian memfasilitasi kegiatan refleksi kemiskinan yaitu kegiatan memahami apa itu kemiskinan dan menjadi kesadaran bahwa kemiskinan perlu ditanggulagi secara bersama-sama.

Langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan swadaya dan pembentukan organisasi lokal. Semua kegiatan proses tersebut didasarkan pada modal sosial kepercayaan, kerjasama dan membangun jaringan sosial. Modal sosial tersebut dimanfaatkan dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan karena berusaha melembagakan nilai universal kemanusiaan (*Value based development*) yang terdiri dari kejujuran, kesetaraan, keadilan, dapat dipercaya, ikhlas/rela, kepedulian. Setelah organisasi lokal terbentuk dan dipimpin secara kolektif maka langkah berikutnya adalah bersama relawan dan fasilitator pimpinan organisasi tersebut memfasilitasi masyarakat untuk menyusun Program Jangka Menengah (PJM) penanggulangan kemiskinan dan membentuk Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) sebagai sasaran program, anggotanya warga miskin yang telah terdata dalam pemetaan swadaya. KSM kemudian melakukan kegiatan bersama bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

D. Penutup.

Potensi lembaga lokal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kelurahan yang sampai saat ini aktif masih aktif adalah Dasa Wisma (Dama), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Rukun Kematian dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Lembaga-lembaga selain LKM merupakan lembaga sosial yang sudah terbentuk dan berlangsung sejak lama dalam rangka memenuhi kepentingan bersama seluruh anggota. Kepentingan bersama ini menjadi pendorong kegiatan bersama yang dilakukan secara terus menerus secara kontinyu sehingga melembaga dan menjadi bagian integral dari pola aktivitas (menjadi institusi) masyarakat.

Strategi pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan

menggali potensi relawan masyarakat yang akan menjadi kader masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Kader masyarakat inilah bersama fasilitator kelurahan memfasilitasi pembentukan organisasi lokal yang diberi nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang berfungsi menjembatani, menghubungkan dan mensinergikan warga miskin dengan sumber daya dari dalam masyarakat dan luar masyarakat yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Proses fasilitasi penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan nilai altruisme, kepercayaan, kerjasama dan jaringan dilakukan melalui siklus penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan organisasi lokal, penyusunan PJM penanggulangan kemiskinan, pembentukan KSM dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa lembaga-lembaga sosial tersebut merupakan potensi modal sosial yang menjadi kekuatan dan sumber daya sosial dalam penanggulangan kemiskinan apabila antar lembaga-lembaga sosial tersebut saling bersinergi. Untuk itu disarankan bagaimana pemerintah kelurahan, dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di kelurahan Kapatihan bisa memfasilitasi agar sinergitas antar lembaga yang ada di kelurahan tersebut dapat terwujud sehingga menjadi sumber daya dalam menanggulangi kemiskinan.

Pustaka Acuan

Aditjondro Junus George dkk. (2010). *Laporan studi riset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: Proyek Buta Tuli Terhadap Aspirasi Masyarakat Desa*, INFID– International NGO Forum on Indonesian Development.

- Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. (2012) *Pedoman Pelaksanaa PNPM Mandiri Perkotaan*, Jarkata: PMU-Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
- DuBois Brenda, Miley Karla. (1999). *Empowering Processes for Social Work Practice*, dalam Shera wes, Wells M. Lilian, (ed) 1999, *Empowerment Practice in Social Work*. Canadian Scholars Press Inc.
- Field, John. (2010). *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana,.
- Fukuyama, Francis. (2002). (Terjemahan) *The great Disruption*. Yogyakarta: Qalam,.
- _____. (2004). (Terjemahan) *The End of History and The Last Man*. Yogyakarta: Qalam,.
- _____. (2010). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Heru Nugroho. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matthew. (1992). *Action*. Cambridge. U.K: Cambridge University Press.
- Huberman, Michael A. & Miles B. Matthew. (1992). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mohammad Jafar Hafsa. (2008). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung Institute for Religious and Institutional Studies (Iris).
- Midgley James and Coley Amy. (2010). *Social Work and Social Development*. Oxford University Press.
- Narayan, D. dan Pritchett, L. (1997). *Cents and Social-ibility: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*. Washington DC Policy Research Department, The World Bank (Mimeograph)
- Robbins, P Susan, Chatterjee, Pranab, Canda, R Edward. (2012). *Contemporary Human Behavior Theory A Critical Perspektif for Social Work*. Allyn & Bacon.
- Rubin, J Herbert and Rubin, S Irene. (2001). *Community Organizing and Development*, by Allyn & Bacon.
- Soetomo. (2010). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Sulistiyani Teguh Ambar. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media,.
- Seagert, dkk. (2001). *Social capital and Poor Community*. New York: Suseell Sage Foundation.